

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1 Kesimpulan**

Pada dasarnya OTT KPK adalah metode atau cara yang dilakukan oleh KPK pada tahap penyelidikan untuk menangkap para terduga koruptor seperti para wakil rakyat dan politisi yang melakukan korupsi. Selain memberikan efek jera dengan penindakan para tersangka korupsi, adanya OTT oleh KPK yang kemudian diberitakan di berbagai media diharapkan akan memberikan efek jera bagi para tersangka korupsi maupun pejabat pemerintahan maupun oknum lainnya yang berniat melakukan korupsi. Selain itu pemberitaan OTT ini juga menjelaskan kepada masyarakat mengenai eksistensi KPK dalam berjuang memberantas korupsi.

Pada tahun 2019 ini dimana menjelang diadakannya PEMILU sendiri ada beberapa kasus OTT yang dilakukan oleh KPK. Diantaranya kasus yang besar menimpa anggota DPR Bowo Sidik dan ketua partai PPP saat itu Romahurmuziy. Dimana Bowo sidik sendiri tersangkut kasus dugaan suap pengangkutan pupuk dan gratifikasi sedangkan Romahurmuziy terlibat kasus dugaan suap terkait seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi di Kementerian Agama (Kemenag). Pemberitaan mereka yang terjaring dalam OTT KPK dengan cepat tersebar ke masyarakat di terutama pada tahun politik ini. Salah satu elemen masyarakat yang mendapatkan informasi mengenai pemberitaan ini yaitu para pemilih muda yang merupakan

mahasiswa, dalam penelitian ini mereka merupakan para aktivis dari organisasi pergerakan Red Soldier.

Red Soldier sendiri merupakan organisasi tim aksi fakultas ilmu sosial dibawah departemen sosial dan politik BEM FIS UNJ. Beberapa kegiatan dalam organisasi ini diantaranya seperti diskusi maupun kajian yang membahas berbagai isu baik didalam kampus maupun skala nasional seperti kasus korupsi ini. Ketika mereka mendapatkan pemberitaan adanya OTT yang menimpa beberapa aktor politik dan partai politik mereka akan mendiskusikannya bersama anggota mereka atau ikut serta dalam kajian dimana menghadirkan para narasumber yang ahli dibidangnya.

Aktif dan kritisnya para aktivis organisasi ini membuat mereka memiliki kesadaran politik yang tinggi dibandingkan masyarakat umum atau bahkan mahasiswa yang tidak ikut serta dalam organisasi pergerakan sejenis seperti Red Soldier ini. Tanggapan para aktivis Red Soldier tersebut setelah adanya aktor politik seperti anggota legislatif yang terjaring OTT KPK merasa kecewa atas tindakan aktor tersebut. Akibat hal tersebut membuat mayoritas dari mereka menganggap semua partai politik itu sama saja buruknya sehingga para aktivis Red Soldier ini tidak menyukai partai politik. Akantetapi adapula yang menganggap partai politik yang memiliki tingkat korupsi lebih sedikit itu lebih baik. Untuk itu tidak sepatutnya semua partai politik tidak disukai.

Adanya banyak pemberitaan OTT oleh KPK ini juga menyebabkan para aktivis Red Soldier lebih berhati-hati dalam menentukan pilihan pada PEMILU 2019

ini. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan David Apter dimana dalam variabel individu mereka sebagai generasi milenial dan kritis menggunakan kemajuan teknologi baik media massa maupun media sosial untuk mencari lebih jauh para calon wakil rakyat yang ada. Sampai pada akhirnya sebagian besar diantara para aktivis Red Soldier memilih golput dalam PEMILU 2019.

Hal ini sesuai dengan teori perilaku politik yang mengatakan tindakan aktor dapat mempengaruhi perilaku khalayak pada mereka dan perilaku buruk khalayak menyebabkan kemungkinan besar tindakan yang sama tidak akan diulangi oleh aktor dikemudian hari, dimana para aktivis Red Soldier melakukan tindakan golput tersebut karena mereka sudah dikecewakan dengan para aktor yaitu politisi dan partai mereka yang terus terkena korupsi, selain itu mereka juga kecewa dengan diperbolehkannya kembali calon legislatif mantan napi korupsi. Untuk itu mereka bertindak dengan tindakan golput berharap perilaku dari para aktor tersebut tidak akan diulangi dikemudian hari.

## **V.2 Saran**

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang telah peneliti paparkan dalam skripsi ini sebelumnya, peneliti memiliki beberapa saran yang ingin disampaikan kepada para Mahasiswa sebagai agen perubahan dan memiliki pendidikan tinggi. anggota serta anggota DPR selaku pembuat kebijakan publik.

Untuk para mahasiswa yang telah membaca hasil penelitian ini, agar dapat mengambil nilai-nilai positif dalam penelitian ini, pada dasarnya Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh KPK bertujuan untuk menindak serta memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi. Selain itu dengan diberitakannya OTT oleh KPK ini di berbagai media bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi. Akan tetapi hasil dari PEMILU 2019 menunjukkan partai politik yang memiliki tingkat korupsi lebih tinggi dari partai lainnya dapat menduduki urutan-urutan teratas pemenang PEMILU 2019. Hal ini menunjukkan masyarakat masih perlu adanya pendidikan politik. Peneliti berharap agar mahasiswa seperti para aktivis Red Soldier yang memiliki tingkat pendidikan tinggi dan nalar kritis mampu turut berpartisipasi dalam memberikan pencerdasan dan pendidikan politik kepada masyarakat agar dapat menghasilkan para pejabat publik yang baik melalui proses demokrasi dikemudian hari.

Untuk Dewan Perwakilan Rakyat RI yang terhormat, diharapkan penelitian ini sebagai bahan masukan untuk pelaksanaan PEMILU, penguatan pemberantasan korupsi dan KPK kedepannya serta dapat mengambil hal-hal positif yang ada dalam penelitian ini untuk menjadi pertimbangan dalam pembuatan kebijakan publik. Salah satu kegunaan dalam OTT oleh KPK ini adalah sebagai metode menangkap terduga koruptor secara langsung atau tertangkap tangan. Cara yang dilakukan bisa melalui laporan masyarakat yang dirindak lanjuti dengan datangnya penyidik ke lokasi kejadian atau melalui proses penyadapan. Dengan cara OTT ini bukti yang didapat

oleh KPK sangatlah kuat karena langsung saat tindakan tersebut dilakukan. Penulis berharap adanya RUU KPK yang baru disahkan pada bulan September 2019 menjadi penguat dan bukannya memperlambat proses berjalannya OTT oleh KPK ini. Selain itu guna membuat iklim demokrasi yang lebih bersih lagi dan lebih memberikan efek jera kepada para koruptor, penulis berharap agar dipertimbangkan untuk segera dibuatnya undang-undang yang mengatur mantan napi korupsi maupun para calon pejabat publik yang tidak melaporkan hasil kekayaan mereka dengan baik tidak berhak mencalonkan diri kembali dan tidak berhak menjabat sebagai bagian dari instansi pemerintahan manapun.

